

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**Lt. 2 Terminal Bulupitu Jl. Suwatio no 48
Teluk, Purwokerto Selatan 53145
Telp. (0281) 636266**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 ini dilakukan berdasarkan pada RPJMD atau RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Bapenda Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dimana dalam dokumen tersebut terdapat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta target indikatornya.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Bapenda Kabupaten Banyumas Tahun 2025 ini disusun diharapkan dapat memberikan gambaran kepada semua pihak yang berkepentingan, khususnya Pemerintah Kabupaten Banyumas tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas di tahun 2025.

Purwokerto, 28 Maret 2024

KEPALA BAPENDA
KABUPATEN BANYUMAS

Ir. KRISTANTA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19650515 199303 1 012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja.

Renja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 secara keseluruhan terdiri dari Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir, dan Penetapan Renja. Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Penyusunan Renja Satuan Kerja Bapenda Kabupaten Banyumas Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Bapenda Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026, dimana tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ke dua dalam periode Renstra Bapenda Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 (Renstra Transisi).

Adapun Ranwal Renja sendiri adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) Tahun yang bertujuan untuk merencanakan pembangunan tahunan Perangkat Daerah, memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja menterjemahkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 90 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bapenda Kabupaten Banyumas, Bapenda Kabupaten Banyumas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan sub bidang pendapatan khususnya pajak daerah I, pajak daerah II dan perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutahiran Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005–2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 90 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan dalam kurun waktu satu tahun dan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapenda Kabupaten Banyumas Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai tolok ukur yang akan dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Banyumas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Sebagai acuan bagi seluruh aparat Bapenda Kabupaten Banyumas didalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2025;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bapenda Kabupaten Banyumas untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 adalah sbb :

BAB	I	PENDAHULUAN
	1.1	Latar Belakang
	1.2	Landasan Hukum
	1.3	Maksud dan Tujuan
	1.4	Sistematika Penulisan
BAB	II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan OPD
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
	2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB	III	UJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
	3.2	Tujuan dan sasaran Renja OPD
BAB	IV	ENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB	V	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, Bapenda Kabupaten Banyumas pada Tahun 2023 melaksanakan 2 (dua) program yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

A. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan 10 (sepuluh) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah;
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
4. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
5. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
6. Penetapan Wajib Pajak Daerah;
7. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
8. Penagihan Pajak Daerah;
9. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
10. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.

B. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 2 (dua) sub kegiatan sbb :
 - 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan, dengan 2 (dua) sub kegiatan sbb :
 - 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 6 sub kegiatan sbb :
 - 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan 2 (dua) sub kegiatan sbb :
 - 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 2 (dua) sub kegiatan sbb :
 - 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 3 (tiga) sub kegiatan sbb :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan yang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sasaran yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama Bapenda sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL I

Pengukuran kinerja utama Bapenda Kabupaten Banyumas Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	19,6%	24,88%
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	4,25%	5,80%

TABEL II
Pengukuran Kinerja Program utama Bapenda Kabupaten
Banyumas Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100
		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100
		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	100
		Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100
		Persentase Sub Komponen PAD yang realisasinya melebihi target pendapatan	%	46,00%	35,00

Pada tahun anggaran 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas mengelola belanja dana APBD untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan sebesar Rp24.182.390.781,00 (dua puluh empat milyar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah), dengan rincian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp21.673.524.481,00 (dua puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah), sedangkan program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan anggaran sebesar Rp2.508.866.300,00 (dua milyar lima ratus delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah). Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Bapenda Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel III berikut:

Tabel III
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Bapenda Kabupaten Banyumas

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
				Target Ranwal Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Ranwal Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW II Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Fungsi Penunjang, Bidang Keuangan							
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah PAD	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	19,6%	19,6%	24,88%	127%	-	-
2.	Meningkatnya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah PAD	Persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah PAD	4,25%	4,25%	5,80%	136%	-	-
3.	Meningkatnya sistem pengelolaan pendapatan daerah	Persentase sub komponen PAD yang realisasi anggarannya melebihi target pendapatan	56%	56%	66,70%	119%	-	-
4.	Meningkatnya pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD)	Jumlah sub komponen PAD yang realisasi anggarannya melebihi target pendapatan	10 sub komponen	10 sub komponen	12 sub komponen	120%	-	-
5.	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pajak daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	-	-
6.	Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	-	-

Tabel III
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Bapenda Kabupaten Banyumas

	Pajak Daerah	kebijakan pajak daera						
7.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	4 unit	4 unit	4 unit	100%	-	-
8.	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	9 laporan	9 laporan	16 laporan	177%	-	-
9.	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	80 OP	80 OP	72 OP	90%	-	-
10.	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1.106.626 dok	1.106.626 dok	1123.248 dok	101%	-	-
11.	Terpenuhinya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	10 layanan	10 layanan	10 layanan	100%	-	-
12.	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-
13.	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	-	-
14.	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10 dokumen	10 dokumen	11 dokumen	110%	-	-
15	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	-	-

Tabel III
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Bapenda Kabupaten Banyumas

16.	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	-	-
17.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	-	-
18.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	-	-
19.	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola Bapenda	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	-	-
20.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang	36 orang	36 orang	100%	-	-
21.	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	-	-
22.	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola Bapenda	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100%	-	-
23.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket	6 paket	100%	-	-
24.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan SIPD	5 paket	5 paket	5 paket	100%	-	-

Tabel III
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Bapenda Kabupaten Banyumas

25.	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	100%	-	-
26.	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	6 paket	6 paket	100%	-	-
27.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 paket	24 paket	25 paket	104%	-	-
28.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket	6 paket	104%	-	-
39.	Terselenggaranya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia Bapenda	12 unit	12 unit	12 unit	100%	-	-
30.	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	4 unit	4 unit	100%	-	-
31.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 unit	10 unit	10 unit	100%	-	-
32..	Terlaksananya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia Bapenda	12 unit	12 unit	12 unit	100%	-	-
33.	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	-	-

Tabel III
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Bapenda Kabupaten Banyumas

		yang Disediakan						
34.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	-	-
35.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan Bapenda	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	-	-
36.	Terpelihara dan terbayarnya pajak kendaraan dinas roda 4 dan 2	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 unit	30 unit	30 unit	100%	-	-
37.	Terpeliharanya Peralatan Mesin dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	25 unit	25 unit	100%	-	-
38.	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	100%	-	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana Organisasi Perangkat Daerah harus menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun berdasarkan hasil dari proses perencanaan yang telah disepakati bersama. Sesuai tugas pokok dan fungsi Bapenda Kabupaten Banyumas menyelenggarakan 1 (satu) urusan wajib pemerintahan yaitu urusan keuangan. Pada tahun 2023 Bapenda Kabupaten Banyumas telah melaksanakan 2 program dan 7 kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut :

Untuk indikator kinerja utama cakupan peningkatan pengelolaan Realisasi pendapatan pada tahun 2023 dalam APBD sebesar Rp854.166.951.662,00 dari target Rp870.559.278.394,00 (98,12%), Sedangkan realisasi belanja pada tahun 2023 sebesar Rp19.794.515.504,00, dibanding rencana belanja pada APBD tahun 2023 sebesar Rp21.673.524.481,00 (91,33%)

Adapun capaian kinerja sesuai tugas dan fungsi Bapenda Kabupaten Banyumas tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel IV
RENCANA PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAPENDA
KABUPATEN BANYUMAS

NO	Indikator	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capain		Proyeksi			Catatan Analisa
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	19,1%	19,2%	19,3%	19,4%	19,5%	19,6%	22,36%	24,88%	21,0%	22%	22,5%	-
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	-	-	3,75%	4,0%	4,25%	7,96%	5,80%	5,0%	5,1%	5,2%	-

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

a. Tingkat Kinerja Pelayanan

Guna mendukung pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan maka tidak lepas dari faktor pendanaan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan di bidang keuangan daerah khususnya pendapatan daerah, sumber-sumber dana yang dipergunakan adalah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Penerimaan keuangan daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan Pendapatan lain-lain yang sah. Dari aspek keuangan, pelaksanaan kegiatan di Bapenda Kabupaten Banyumas hanya fokus pada penerimaan Pajak Daerah, sedangkan untuk sektor retribusi dan sektor lainnya hanya sebagai koordinator.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapenda.

1. Masalah Pokok

Terdapat 1 (satu) masalah pokok yaitu belum optimalnya akuntabilitas penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

2. Masalah, terdapat 1 (satu) masalah yaitu belum optimalnya sistem pengelolaan pendapatan daerah.

3. Akar Masalah

Sedangkan untuk akar masalah setelah diadakan kajian dan analisa secara sederhana dan komprehensif terdapat 10 (sepuluh) akar masalah al :

- a. kurang efektifnya dalam perencanaan pengelolaan pajak daerah;
- b. kurang optimalnya dalam analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah;
- c. sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah yang kurang memadai;
- d. pendataan dan pendaftaran obyek pajak yang kurang massif;
- e. penilaian PBB-P2 serta BPHTB yang belum menyeluruh;
- f. penetapan WP daerah belum optimal;
- g. kurang optimalnya pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
- h. penagihan pajak daerah belum dilaksanakan secara kontinyu dan terjadwal;
- i. penyelesaian keberatan pajak daerah masih kurang optimal
- j. pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah belum dilaksanakan secara rutin dan terprogram.

c. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah (RPJMD)

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau RPD tahun 2024-2026 Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Banyumas masih rendah. Belum optimalnya peningkatan potensi pendapatan daerah terutama dari pajak daerah disebabkan dari sisi kesadaran wajib pajak, perubahan regulasi, keterbatasan SDM pemeriksa pajak, kesulitan dalam mengidentifikasi Subjek dan Objek Pajak di lapangan dalam rangka updating objek dan NJOP. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD tahun 2024-2026 serta penunjang urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang urusan keuangan yang diselenggarakan maka fungsi dan tugas Bapenda terkait erat dengan pencapaian misi ke 3, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banyumas Yang Maju Dan Berdaya Saing, serta dalam rangka untuk mendukung isu strategis RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 yang pertama yaitu Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan.

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD
Tantangan

Dalam rangka mengembangkan pelayanan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas diperkirakan akan menghadapi sejumlah tantangan, antara lain sebagai berikut:

- a. semakin tingginya kebutuhan terhadap pendapatan daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah,
- b. belum optimalnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, menyebabkan persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum setara dengan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. belum optimalnya akurasi data potensi pendapatan daerah;
- d. komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mewujudkan good governance dan clean government seiring agenda reformasi birokrasi.

Peluang :

Selain tantangan-tantangan tersebut, terdapat pula beberapa peluang bagi pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, antara lain sebagai berikut:

- a) makin pesatnya pembangunan hotel, restoran atau rumah makan;
- b) kewajiban membayar pajak harus diiringi dengan sanksi ketika tidak dijalankan, harus dilakukan penyusunan aturan yang memuat sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta penegakan aturan tersebut dengan melibatkan semua pihak terkait;
- c) tersedianya integrasi sistem sebagai sarana data informasi terpadu dan terpusat yang akurat, valid, dan cermat serta detil mengenai objek pajak, Wajib Pajak serta data-data lain yang terkait dengan perpajakan bersinergi dengan data-data yang dimiliki/dibutuhkan oleh SKPD lainnya (Kependudukan, DPMTSP, BPN);
- d) kemajuan teknologi informasi dan implementasinya yang semakin meningkat dalam menunjang pelayanan publik berbasis IT.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja OPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Bapenda Kabupaten Banyumas. Dalam dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaian yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Bapenda Kabupaten Banyumas. Disamping itu dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Bapenda. Penjabaran dari rancangan awal rencana kerja Bapenda Kabupaten Banyumas tahun 2025 dapat dilihat padatable V berikut :

Tabel V
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA
BAPENDA TAHUN 2025 KABUPATEN BANYUMAS

No	Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (000)	Prog/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab Bms, Pwt Selatan	Persentase sub komponen PAD yang realisasi anggarannya melebihi target pendapatan	57%	4.449.199	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab Bms, Pwt Selatan	Persentase sub komponen PAD yang realisasi anggarannya melebihi target pendapatan	57%	4.449.199	
I.	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah sub komponen PAD yang realisasi anggarannya melebihi target pendapatan	11 sub komponen	4.449.199	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah sub komponen PAD yang realisasi anggarannya melebihi target pendapatan	11 sub komponen	4.449.199	
1.	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah dokumen perencanaan pajak daerah	2 dokumen	73,535	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah dokumen perencanaan pajak daerah	2 dokumen	73,535	
2.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	3 dokumen	39,325	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	3 dokumen	39,325	
3.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	7 unit	67,210	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	7 unit	67,210	
4.	Pendataan dan	Kab Bms,	Jumlah Laporan	12 laporan	251,240	Pendataan dan	Kab Bms,	Jumlah Laporan	12 laporan	251,240	

	Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pwt Selatan	Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah			Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pwt Selatan	Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah			
5.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	65 obyek pajak	2,078,129	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	65 obyek pajak	2,078,129	
6.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1.200.000 dok	753,560	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1.200.000 dok	753,560	
7.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	10 layanan	115,500	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	10 layanan	115,500	
8.	Penagihan Pajak Daerah	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 dokumen	913,400	Penagihan Pajak Daerah	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 dokumen	913,400	
9.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 dokumen	124,300	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 dokumen	124,300	
10.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	20 dokumen	33,000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	20 dokumen	33,000	
B.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Bms, Pwt Selatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat	100%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Bms, Pwt Selatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat	100%		

			daerah					daerah			
II.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	85.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	85.000	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	10,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	10,000	
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	75,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	75,000	
III.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 laporan	14.964.084	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 laporan	14.964.084	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 orang	14,827,084	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 orang	14,827,084	
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dokumen	137,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dokumen	137,000	
IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 laporan	934.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 laporan	934.700	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik	4 paket	10,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik	4 paket	10,000	

	Bangunan Kantor		Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Bangunan Kantor		Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	107,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 paket	107,000	
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	28,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	28,000	
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	395,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	395,000	
5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	90,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	90,000	
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koord dan konsultasi SKPD	12 laporan	286,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koord dan konsultasi SKPD	12 laporan	286,000	
7.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	18,700	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 dokumen	18,700	
V.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 laporan	400.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	400.000	

1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	276,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 unit	276,000	
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 unit	124,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	124,000	
VI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	5.607.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 laporan	5.607.000	
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	107,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	107,000	
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	5,500,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	5,500,000	
VII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan	12 laporan	177.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan	12 laporan	177.000	

	Daerah		Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Daerah		Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 unit	107,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 unit	107,000	
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	64,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	64,000	
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	1 unit	6,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Bms, Pwt Selatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	1 unit	6,000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang sangat penting dalam menjalankan roda pembangunan dan pemerintahan yang setiap tahunnya ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Tahapan yang lebih baik harus melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sehingga dapat ditanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam tahapan perencanaan dilakukan melalui pembahasan atas kebijakan yang akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat. Sedangkan untuk penganggaran keuangan daerah ditetapkan dalam kebijakan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan adalah suatu langkah yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah”

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

“ Kenaikan pendapatan asli daerah”

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rincian Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas secara lengkap dapat dilihat pada dibawah ini :

TABEL 4.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA RENCANA PENDANAAN TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp 000)	LOKASI		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp 000)	
BADAN PENDAPATAN DAERAH				26.616.984				21.520.050	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			26.616.984	Kab Bms, Pwt Sel			21.520.050	
5.02	KEUANGAN								
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase sub komponen PAD yang realisasi anggarannya melebihi target pendapatan		4.449.199	Kab Bms, Pwt Sel			4.449.199	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah sub komponen PAD yang realisasi anggarannya melebihi target pendapatan		4.449.199	Kab Bms, Pwt Sel			4.449.199	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen perencanaan pajak daerah	2 dok	73.535	Kab Bms, Pwt Sel		2 dok	70.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembang an pajak	3 dok	39.325	Kab Bms, Pwt Sel		3 dok	35.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

		daerah dan kebijakan pajak daerah						
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	7 Uni	67.210	Kab Bms, Pwt Sel	7 unit	63.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 laporan	251.240	Kab Bms, Pwt Sel	12 laporan	229.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	60 Obyek pajak	2.078.129	Kab Bms, Pwt Sel	65	1.890.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1.150.000 dok	753.560	Kab Bms, Pwt Sel	1.200.000 dok	686.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	10 layanan	115.500	Kab Bms, Pwt Sel	10 layanan	106.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 dok	913.400	Kab Bms, Pwt Sel	12 dok	830.500	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 dok	124.300	Kab Bms, Pwt Sel	12 dok	124.300	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	20 dok	33.000	Kab Bms, Pwt Sel	22 dok	31.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X	Non Urusan							
X.XX	Non Urusan							
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD		85.000	Kab Bms, Pwt Sel		78.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	10.000	Kab Bms, Pwt Sel	3 dok	8.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	75.000	Kab Bms, Pwt Sel	4 laporan	70.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	14.964.084	Kab Bms, Pwt Sel	-	11.826.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang	14.827.084	Kab Bms, Pwt Sel	34 orang	11.700.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dok	137.000	Kab Bms, Pwt Sel	4 dok	126.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		934.700	Kab Bms, Pwt Sel		860.550	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	10.000	Kab Bms, Pwt Sel	4 paket	8.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	107.000	Kab Bms, Pwt Sel	4 paket	99.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	28.000	Kab Bms, Pwt Sel	4 paket	27.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	395.000	Kab Bms, Pwt Sel	4 paket	360.550	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	4 paket	90.000	Kab Bms, Pwt Sel	4 paket	83.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

		Disediakan						
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	286.000	Kab Bms, Pwt Sel	12 lap	265.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dok	18.700	Kab Bms, Pwt Sel	12 dok	18.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		400.000	Kab Bms, Pwt Sel		367.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	276.000	Kab Bms, Pwt Sel	6 unit	252.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 unit	124.000	Kab Bms, Pwt Sel	6 unit	115.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.607.000	Kab Bms, Pwt Sel		4.168.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	107.000	Kab Bms, Pwt Sel	12 lap	98.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap	5.500.000	Kab Bms, Pwt Sel	12 lap	4.070.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik		177.000	Kab Bms, Pwt Sel		165.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

	Pemerintahan Daerah	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 unit	107.000	Kab Bms, Pwt Sel			99.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	64.000	Kab Bms, Pwt Sel		30 unit	60.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	1 unit	6.000	Kab Bms, Pwt Sel		1 unit	6.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

BAB V

PENUTUP

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 ini dapat disusun. Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan atau draft dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya Badan Pendapatan Daerah pada Tahun 2025. Renja ini disusun juga dalam rangka mengetahui hasil pencapaian yang dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 ini diucapkan terima kasih dan semoga upaya Badan Pendapatan Daerah di tahun tersebut dapat berjalan lebih terarah dan terukur. Selanjutnya Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai bila dilaksanakan dengan dedikasi dan kerja keras, terutama semua aparatur di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas. Akhirnya, kepada Tuhan Yang Maha Esa kita berserah diri, semoga segala usaha yang dirintis untuk mencapai kondisi ideal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana diharapkan, dapat diwujudkan hendaknya. Aamiin.

Purwokerto, 28 Maret 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS



Ir. KRISTANTA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19650515 199303 1 012